**Judul : Sistem Informasi Manajemen Administrasi, Monitoring, dan Evaluasi Anggaran STIS**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

**Outline:**

* Gambaran umum ttg kegiatan manajemen keuangan lembaga/Kementrian dan Gambaran umum tahapan manajemen keuangan

Sumber: Sari Sisilianingsih

Setiap kementrian atau lembaga pemerintahan mempunyai kewajiban untuk membuat rencana kerja kegiatan dan anggaran yang dikenal dengan RKA-KL (Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga). RKA-KL ini berisi detail rencana kegiatan kementrian atau lembaga pemerintahan bersangkutan selama setahun yang akan dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).DIPA ini kemudian dituangkan dalam SPM (Surat Perintah Membayar) yang akan diajukan ke kementrian keuangan untuk dicairkan menjadi anggaran guna membiayai operasional kementrian dan lembaga.Anggaran yang telah digunakan akan direkap pada aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang dibangun oleh kementrian keuangan.

Pengelolaan keuangan yang baik dimulai dari tahap pengajuan keuangan yang terorganisir, pelaksanaan dan realisasi anggaran, sampai tahap perekapan antara anggaran yang diterima dan telah digunakan. Perekapan dana ini tentunya perlu dimonitor dan diawasi khususnya dalam hal penarikan dana (pagu) yang tersedia.

Pengelolaan dan manajemen administrasi yang baik merupakan bagian penting dlam suatu organisasi. Berdasarkan PP No. 90 Tahun 2010 Pasal 19 Ayat 2, pengukuran dan evaluasi kinerja dapat dilihat pada faktor:

a.b.c.d.e.

Sumber: Moh. Roufiq Azmy

BPS RI sebagai salah satu lembaga pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menyusun RKA-KL sebagai pedoman dalam melaksanankan program, kegiatan, dan anggaran. Kegiatan yang diajukan BPS merupakan inisiatif baru ataupun kegiatan yang berlanjut dari tahun anggaran sebelumnya. Rencana kegiatan BPS dan kementrian lain kemudian dibahas oleh DPR kemudian dituangkan menjadi UU APBN yang menjadi acuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA memuat informasi rencana penarikan anggaran yang dapat dilakukan setiap bulan. Perencanaan penarikan tersebut disusun untuk melakukan pengendalian dan pengorganisasian anggaran agar kegiatan tepat sasaran. Sebagai wujud nyata, Departemen Keuangan mendistribusikan aplikasi RKAKL-DIPA kepada seluruh satuan kerja, baik pusat maupun daerah yang diperlukan oleh Kementrian Keuangan untuk mengelola kegiatan yang dilaksanakan seluruh kementrian/lembaga. Sedangkan untuk pengorganisasian anggaran pada lingkup internal, BPS RI menggunakan SIMPRO, namun pada SIMPRO ini masih terdapat berbagai kekurangan, antara lain:

* Sistem yang tidak nyaman dipakai (*user friendly*) untuk *review* penarikan keseluruhan untuk tiap bulannya, hal ini mempersulit untuk melihat saldo yang tersisa pada waktu tertentu.
* SIMPRO yang saat ini tidak dapat mencakup pengelolaan hingga level detail, sehingga sukar untuk diketahui item mana yang sudah terealisasi pada bulan tersebut.
* SIMPRO yang ada merupakan sistem informasi yang berbasis *file*, dimana kegiatan pengelolaan anggaran hanya efektif dan benar jika dilakukan oleh beberapa *user*, maka akan terjadi duplikasi saldo yang menyebabkan pagu anggaran berubah.
* Sistem yang tidak *user friendly* menyebabkan banyak unit atau *subject matter* harus menghubungi pihak Bina Program untuk melihat saldo yang tersisa jika hendak melakukan penarikan, yang mana seharusnya dapat dilihat melalui sistem tersebut.
* Tidak adanya fasilitas yang disediakan oleh sistem sebagai penghubung antara Biro Bina Program sebagai pengelola anggaran dengan unit kerja sebagai PA (Pengguna Anggaran) untuk proses perubahan anggaran maupun perubahan rencana penarikan anggaran.

Sumber: Arga Parama Yufinanda

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Sumber: Ryche Pranita

Bidang pengelolaan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada Pendekatan Anggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis Kinerja. Untuk mendapatkan anggaran, BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen diwajibkan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). RKA yang disusun secara berjenjang oleh Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari BPS pusat dan daerah. Untuk Satker BPS pusat dimulai dari sub direktorat/ bagian/ bidang/ fungsional sampai dengan dengan deputi/sekretaris utama. RKA tersebut disusun dan ditentukan tingkat urgensi dan skala prioritas berdasarkan kegiatan BPS yang akan memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga dapat dialokasikan sumber daya, termasuk anggaran, sesuai dengan prestasi yang akan dicapai. Proses ini berlanjut dengan terbentuknya RKA-BPS dan berakhir menjadi Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Seperti yang diungkapkan dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 yaitu “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” sistem penganggaran terus dilakukan penyempurnaan. Kementrian keuangan telah memfasilitasi dengan menyediakan aplikasi yang membantu mengelola keuangan setiap Kementrian dan Lembaga yaitu RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga) dan BPS sendiri telah memiliki Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran SIREKA untuk mengumpulkan Rencana Kerja dan Anggaran BPS dari seluruh Satker di bawah BPS Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam mencapai tujuan efisien, ekonomis dan efektif dalam pengelolaan keuangan khususnya perencanaan anggaran.

Selama ini penyusunan RKA dilakukan secara online melalui SIREKA. RKA seluruh Satker di-*entry* oleh pihak pusat dan dicetak kemudian disahkan/ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (Kasubdit/Kabid/Kabag) dengan ditandatangani oleh direktur/kepala/biro sebagai pengesahan untuk kemudian dikirimkan kepada Biro Bina Program Bagian Penyusunan Rencana. Hasil data SIREKA yang diperoleh melalui pengumpulan dari web diolah oleh Bagian Penyusunan Rencana Anggaran masih menggunanakan Microsoft Excel untuk menyeleksi usulan anggaran yang diajukan satker untuk menghindari adanya duplikasi kegiatan dan mengurangi kegiatan yang tidak perlu, dimana proses penyeleksian tersebut menggunakan beberapa komputer yang tidak terintegrasi.

Hasil penyeleksian di atas merupakan usulan anggaran yang akan dikirimkan pada Kementrian Keuangan dan Lembaga Terkait. Hasil penyeleksian menyebabkan adanya perubahan usulan Satker sehingga diperlukan adanya laporan untuk Satker sehingga diperlukan adanya laporan untuk satker yang mengalami perubahan anggaran.

Setelah kementrian keuangan mengumumkan usulan dana yang diterima, umumnya terdapat selisih antara dana yang diusulkan dengan dana yang diterima. Hal ini dibutuhkan sarana untuk mengubah jumlah dan harga satuan, dimana akan sangat membantu apabila terdapat fungsi yang menunjukkan historis dari kegiatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya untuk membantu kegiatan mana saja yang perlu dikurangi biayanya.

Setelah proses perubahan dana di atas, Bagian Penyusunan Rencana di Biro Bina Program harus membuat laporan untuk Satker yang mengalami perubahan dana. Pembuatan laporan ini masih membutuhkan sarana yang mempermudah pembuatan laporan yang terhubung dengan data dana anggaran yang mengalami perubahan.

Nilai Standar Biaya Umum (SBU) yang menjadi acuan dalam penganggaran dimasukkan dalam sistem untuk mempermudah *user* dalam perhitungan anggaran. Dengan memberikan *table reference* yang ada, *user* tidak perlu lagi melihat SBU melalui buku yang disediakan.

Dana yang telah sesuai dengan Pagu Definitif dientri pada aplikasi RKA-KL dapat menghabiskan waktu dan rentan terjadinya human error. Selain itu tstruktur yang berbeda antara database SIREKA dan RKA-KL menyebabkan pengubahan struktur, agar database SIREKA dapat dimasukkan ke dalam aplikasi RKA-KL.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di atas dengan harapan dapat menjadi panduan dan mempermudah para penyusun rencana anggaran, sehingga RKA yang diusulkan menjadi berkualitas, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, RKA yang diusulkan dapat mempertahankan status keuangan BPS Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan meningkatkan ketepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran.

Sumber: UU No. 17, Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penjelasan: Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

Sumber: UU No. 17, Pasal 14 ayat (1)

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

Sumber: PP No. 90 Tahun 2010, Pasal 19

ayat (1) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. ayat (2) Pengukuran dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

1. tingkat Keluaran (*output*);
2. capaian Hasil (*outcome*);
3. tingkat efisiensi;
4. konsistensi antara perencanaan dan implementasi; dan
5. realisasi penyerapan anggaran.

Tambahan:

Membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan (Proving). 2) Mempelajari faktor faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (*Improving*).

* Gambaran umum tentang pengelolaan keuangan di STIS
* Pentingnya manajemen administrasi, monitoring, dan Evaluasi yang baik, efektif dan efisien.
* permasalahan manajemen di STIS
* permasalahan monitoring di STIS
* permasalahan evaluasi di STIS
* kebutuhan pembangunan sistem untuk mengatasi masalah-masalah tsb

Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan STIS adalah bentuk tanggung jawab penggunaan APBN. Pengelolaan tersebut sebagian besar masih menggunakan sistem yang berbasis *file* meskipun sebagian sudah menggunakan *database*. Sistem yang ada hanya mendukung sebagian kegiatan saja, misalnya pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran honor mengajar. Selain itu, sistem tersebut belum sepenuhnya otomatis karena *output-*nya baru berupa *file* csv yang masih harus dipindahkan secara manual ke dalam *template Microsoft Excel* sebelum akhirnya dapat dicetak. Seluruh rangkaian ini pun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi duplikat atau kesalahan lain. Hal-hal tersebut menyebabkan kegiatan di Subbagian Keuangan menjadi tidak efisien.

Selain itu, revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) juga belum dapat dilakukan dan didokumentasikan dengan efisien. Padahal, meskipun jarang, POK dapat mengalami revisi paling cepat seminggu sekali.

Saat ini *monitoring* dan evaluasi daya serap anggaran STIS masih belum efektif. Hal ini disebabkan belum ada sistem untuk menyimpan setiap transaksi keuangan. Subbagian Keuangan STIS tidak dapat mengetahui tingkat keluaran (*output*), capaian hasil (*outcome*), dan realisasi penyerapan anggaran secara *real-time.* Padahal, penggunaan anggaran perlu dimonitor dan diawasi khususnya dalam hal penarikan dana yang tersedia. Belum adanya sistem yang dapat mendeteksi penarikan dana, menyebabkan dana yang terealisasi dapat melebihi dana yang disediakan. Subbagian Keuangan STIS memerlukan sistem yang dapat memberikan peringatan saat penarikan dana melebihi dana yang disediakan. Dengan demikian diharapkan antara dana yang masuk dan keluar dapat terjadi keseimbangan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi manajemen administrasi, *monitoring*, dan evaluasi anggaranyang dapat digunakan oleh Subbagian Keuangan STIS agar penggunaan anggaran dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

* 1. **Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum ada sistem *monitoring.*
2. Sistem yang ada belum sepenuhnya menggunakan database.
3. Proses pembuatan surat-surat masih manual sehingga berpotensi menimbulkan banyak kesalahan.
4. Belum ada fitur untuk menangkap riwayat proses revisi data yang telah ada.
5. Belum ada data *warehouse* khusus.
   1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah membangun sistem informasi manajemen administrasi, monitoring, dan evaluasi anggaran di STIS yang dapat memudahkan Bagian Keuangan STIS dalam melakukan pengawasan manajemen keuangan STIS.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem manajemen, evaluasi dan dan monitoring anggaran di STIS saat ini untuk menemukan kendala, permasalahan, dan kebutuhan sistem oleh Bagian Keuangan STIS.
2. Melakukan perancangan model, arsitektur, *user interface*, dan database.
3. Melakukan implementasi terhadap rancangan yang telah didbuat.
4. Menguji coba dan mengevaluasi sistem.
   1. **Manfaat Penelitian**
5. Bagi ilmu pengetahuan :

* Sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya dalam bidang sistem informasi manajemen keuangan

1. Bagi Badan Pusat Statistik :

* Untuk mempermudah manajemen keuangan di STIS yang merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan BPS.
  1. **Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. [Beberapa masalah yang dapat dibuatkan solusinya oleh skripsi ini]
2. Sistem ini akan dibangun berbasis web.

**DAFTAR PUSTAKA**